

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)



Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter

Sulkipani, S.Pd.,M.Pd., dan Camellia, S.Pd.,M.Pd.

Daftar Isi

A. Pengantar PKn.....	2
B. Hakikat PKn.....	4
C. Landasan Penyelenggaraan PKn.....	6
D. Fungsi dan Tujuan PKn.....	10
E. Hakikat Pendidikan Karakter.....	13
F. Karakter Bangsa Indonesia Berdasarkan Pancasila.....	16
G. Pembentukan Karakter Melalui PKn.....	18
Soal Latihan.....	20
Daftar Pustaka.....	21

A. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Keberadaan bangsa Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, mulai dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, sampai pada periodeisasi sebelum, dan setelah kemerdekaan. Pertumbuhan negara Indonesia sangat kental dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kebulatan tekad dan kemauan bangsa Indonesia untuk selalu maju dan memperbaiki diri sebagai bangsa yang berdaulat di mata dunia. Tonggak dari semangat bangsa Indonesia tidak terlepas dari proses perebutan kemerdekaan sampai pada proklamasi 17 Agustus 1945.

Peristiwa tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi para penerus perjuangan bangsa untuk melanjutkan perjuangan dengan masa yang berbeda. Kebulatan tekad dan semangat juang para pendiri bangsa harus selalu menjadi pemicu semangat kemajuan bangsa Indonesia di tahun-tahun mendatang. Terutama dalam menghadapi tantangan dari globalisasi.

Globalisasi adalah proses yang tidak dapat ditahan, ditunda maupun dihentikan. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus selalu siap dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin deras dengan ditandainya semakin majunya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemajuan tersebut harus selalu dapat bangsa Indonesia imbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang hebat dan sumberdaya alam yang memadai.

Sumberdaya manusia Indonesia harus mampu bersaing sehingga tidak ketinggalan dengan persaingan manusia-manusia di dunia serta diimbangkan dengan semangat juang untuk memajukan bangsa Indonesia. Manusia-manusia Indonesia yang tersebut harus dibekali dengan rasa cinta kepada tanah air Indonesia sehingga tidak terlena dengan kemampuan yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Proses penanaman rasa cinta kepada tanah air tersebut dapat dilakukan dengan cara menyisipkan pendidikan di dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan. Pendidikan tersebut dapat dilakukan dengan pendidikan kewarganegaraan baik secara formal (di sekolah dan perguruan tinggi) maupun informal (di keluarga dan masyarakat).

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dilakukan dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sedangkan di perguruan tinggi dengan adanya mata kuliah rumpun atau kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian dengan nama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).



PKn sebagai wadah menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air
(sumber: google.com)

B. Hakikat PKn

Penggunaan istilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak terlepas dari istilah awalnya yang diambil dari istilah asing yaitu *civic education* atau *citizenship education*. Jika diartikan *civic education* adalah sebuah mata pelajaran yang ada di sekolah dimana mata pelajaran tersebut dipersiapkan untuk menjadikan penduduk negara sebagai penduduk yang dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian istilah *citizenship education* memiliki makna bahwa pendidikan kewarganegaraan tersebut dapat dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, misalnya di dalam keluarga, lingkungan masyarakat (organisasi masyarakat), atau juga media massa. Kedua istilah tersebut dikemukakan oleh John C. Cogan.

PKn secara akademik memiliki cara pandang tersendiri yaitu berdasarkan domain kurikuler dan domain sosial kultural.

1. Secara kurikuler: PKn merupakan konsep pendidikan yang dilakukan dalam lingkup yang formal dan nonformal.
2. Secara sosial kultural : PKn merupakan konsep pendidikan yang hanya ada di masyarakat.

Kedua pandangan tersebut jika dikaitkan dengan PKn di Indonesia sangat relevan. Karena PKn di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur formal dan nonformal. Pada jalur formal PKn sejalan dengan amanah dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dimana pendidikan ialah usaha sadar dan terencana agar terciptanya suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri dari setiap peserta didik agar memiliki kekuatan dan kemampuan spriritual, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang digunakan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Fungsi dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dalam hal membentuk watak dan perkembangan peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan bangsa sehingga tercapainya tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dari setiap peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian, khusus di perguruan tinggi mata kuliah MPK merupakan wadah atau pedoman bagi terselenggaranya program studi yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan harapan atau cita-cita Pancasila, UUD Th 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas. Sebagaimana amanah Undang-Undang Sisdiknas Pasal 37 bahwa kurikulum pendidikan tinggi didalamnya wajib memuat pendidikan Agama, PKn serta Bahasa.

PKn sebagai program pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila juga menjadi sumber berkembangnya nilai moral, dan nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai tersebut bersumber dan berakar pada budaya bangsa Indonesia sehingga inilah yang diharapkan akan memperkokoh jati diri bangsa Indonesia. Hal inilah yang diharapkan oleh perguruan tinggi dimana mata kuliah PKn dapat menjadi wadah bagi berkembangnya mahasiswa sebagai manusia individu maupun manusia social yang berkepribadian Indonesia yang kuat.

Menurut Somantri (2001: 166) fungsi PKn adalah sebagai usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan juga psikologis mempermudah peserta didik untuk dapat belajar menginternalisasi dari moral pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan dalam melandasi tujuan pendidikan nasional yang dapat diwujudkan dalam intgrasi pribadi. Dengan demikian, PKn menjadi usaha sadar dan terencana guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan khususnya warga negara dalam membentuk dan menumbuhkan jati diri bangsa sebagai landasan

pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara guna kelangsungan kesejahteraan bangsa Indonesia. PKn juga sebagai upaya membekali manusia (mahasiswa) dengan kemampuan pengetahuan dan kemampuan bersosialisasi dalam menjalani hubungan dengan individu lainnya, masyarakat, bangsa, negara bahkan warga negara dunia termasuk terhadap ham masing-masing individu. PKn mengajarkan kita sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab, tunduk kepada negara dan memiliki rasa toleransi kepada sesama.

PKn sendiri memiliki objek formal dan objek material antara lain objek formal PKn adalah hubungan warga negara dengan negara dan pembelaan negara sedangkan objek material PKn adalah segala yang berhubungan dengan warga negara yang patuh secara empiric dan non empiric contohnya wawasan, sikap, dan juga perilaku warga negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

C. Landasan Penyelenggaraan PKn

Penyelenggaraan PKn tentunya memiliki landasan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang ada dalam suatu negara. Landasan tersebut tersusun secara ilmiah dan hokum. Berikut Penjelasan dari masing-masing landasan tersebut.

1. Landasan Ilmiah

Landasan ilmiah penyelenggaraan PKn memiliki tiga isi antara lain yaitu dasar pemikiran PKn, objek pembahasan PKn dan rumpun pada bagian keilmuan.

a. Dasar Pemikiran PKn

Tuntutan menjadi manusia yang berguna bagi sebuah negara tentunya menjadikan manusia tersebut harus mampu bersaing secara personal dengan manusia lainnya terutama dalam hal ipteks dan terlebih pada kemampuan pengelolaan diri (karakter). Karakter atau sikap tersebut tentunya bukanlah suatu yang mudah untuk diciptakan sehingga memerlukan instrumen untuk melaksanakannya. Salah satu jalannya adalah melalui PKn secara formal maupun nonformal. Dibeberapa negara juga dilakukan PKn misalnya Amerika dengan *civics* dan negara-negara lainnya dengan istilah tertentu.



Perilaku cinta tanah air
(sumber: google.com)

b. Objek Pembahasan PKn

Setiap ilmu tentunya harus memiliki objek pembahasan yang jelas termasuk PKn. Objek pembahasan PKn tersebut adalah objek formal dan objek material sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi bahwa objek formal dan objek material antara lain objek formal PKn adalah hubungan warga negara dengan negara dan pembelaan negara sedangkan objek material PKn adalah segala yang berhubungan dengan warga negara yang patuh secara empirik dan non empirik contohnya wawasan, sikap, dan juga perilaku warga negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

c. Rumpun pada Bagian Keilmuan

Sebagai rumpun keilmuan PKn dapat disamakan atau disejajarkan dengan *civics education* sebagai bidang ilmu atau bidang studi ilmiah yang terkenal diberbagai negara. PKn juga bersifat interdisipliner karena diambil dari berbagai bidang keilmuan, (Sukaya dkk, 2002: 5). Oleh karena itu, karena itulah PKn menjadi bahasan bagi perkembangan ekonomi, sejarah perjuangan bangsa dan juga sebagai kajian filsafat.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum atau landasan konstitusional PKn antara lain UUDNRI tahun 1945, Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 12 Tentang Perguruan Tinggi.

a. UUDNRI Tahun 1945

- 1. Pembukaan

Pada pembukaan terdapat di alenia kedua yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbagaia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Kemudian juga terdapat pada alinea keempat yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada: Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua alenia tersebut merupakan cita-cita, tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan dalam kancah nasional maupu internasional.

- 2. Pasal 27 ayat 1 berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hokum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berarti masyarakat Indonesia harus tunduk dan taat kepada hokum yang berlaku sebagai konsekuensi menjadi seorang warga negara.
- 3. Pasal 27 ayat 3 berbunyi hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara
- 4. Pasal 30 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

- 5. Pasal 31 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Dengan demikian setiap isi dari UUDNRI Tahun 1945 tersebut memiliki makna antara lain:

1. Makna dari pembukaan alinea ke dua dan keempat adalah pujian bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang telah berjuang sekian lama dalam mencapai kemerdekaan dengan demikian maka harus senantiasa bersyukur dan menjadikan hari kemarin sebagai pelajaran untuk masa depan dan tidak lupa bahwa bangsa Indonesia memiliki tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemajuan bangsa, dan seterusnya.
2. Makna Pasal 27 ayat 1 dan 3 adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hokum dan pemerintahan dan wajib tunduk terhadap hokum dan pemerintahan tersebut. Selain itu juga warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada negara.

Menurut Darmodiharjo, (1991: 67) Pembelaan yang dilakukan kepada negara haruslah berlandaskan kepada doktrin bahwa keamanan nasional adalah nomor satu dan setiap warga negara haruslah berusaha menciptakan system pertahanan dan keamanan nasional yang dapat menyukseskan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya.

3. Makna Pasal 30 ayat 1

Setiap warga negara berhak atas rasa aman dan mengamankan negara. Warga negara wajib secara penuh membela negara apabila dalam kondisi yang tidak aman. Bentuk mempertahankan keamanan negara dalam dilakukan secara fisik dan non fisik. Misalnya fisik yaitu berperang secara langsung sedangkan nonfisik dengan persaingan IPTEKS.

4. Makna Pasal 31 ayat 1

Setiap warga negara dalam status dan kondisi apapun berhak mengenyam pendidikan dan pemerintah wajib mengusahakannya. Salah satu yang dapat dilakukan dan telah dilakukan pemerintah adalah mealalui pembebasan biaya sekolah untuk tingkat dasar, dan juga pemberian bantuan beasiswa bagi warga negara yang berprestasi dan bagi warga negara yang tidak mampu dengan menganggarkannya dalam APBN.

b. Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Penyelenggaraan PKn dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 37 yang mana berbunyi bahwa pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, PKn serta Bahasa. Artinya bahwa jika pendidikan tinggi mengabaikan PKn maka akan menyalahi kosntitusi.

c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012

Penyelenggaraan PKn dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 35 ayat 3 yang menjelaskan juga bahwa pendidikan tinggi harus memuat pendidikan agama, PKn serta bahasa.

d. Keputusan Dirjen tentang Pendidikan Tinggi No. 267/dikti/KEP/2000 tentang penyempurnaan kurikulum ini mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK).

Keputusan tersebut antara lain memuat isi yaitu:

1. Mata Kuliah PKn dan PBBN ialah komponen yang tidak terpisahkan dari MPK
2. MPK adalah salah satu susunan kurikulum dari perguruan tinggi Indonesia
3. Mata Kuliah PKn merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada diperguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

D. Fungsi dan Tujuan PKn

PKn dalam ruang lingkup perguruan tinggi sejatinya membahas tentang hubungan antara warga negara dan negara, selain itu PKn juga menekankan pada aspek penanaman pendidikan bela negara. Dimana ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran guna membentuk sikap dan rasa cinta kepada tanah air dan menanamkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada dasarnya berupa peran warganegara dalam pemerintahan negara. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Sisman dan Rauf (2016: 85) yaitu pada dasarnya peran warga negara adalah tugas yang harus ia lakukan sesuai dengan status yang ia miliki. Dalam hal ini sebagai seorang warga negara. Beberapa hubungan antara warga negara dengan negara di Indonesia antara lain diatur dalam UUDNRI Tahun 1945 misalnya hubungan tentang hak dan kewajiban dimana diatur mulai dari pasal 27-pasal 34.

Sebagai upaya menanamkan sikap yang baik PKn tentunya memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Fungsi dan tujuan tersebut antara lain:

1. Fungsi PKn

PKn sejatinya tidak hanya memuat pembelajaran tentang hubungan warga negara dengan negara nya saja tetapi materi dalam PKn juga mencakup berbagai isu yang mungkin terjadi di masa depan Indonesia kelak misalnya ham, demokrasi, dan lingkungan hidup (Ristekdikti, 2016). Selain hal-hal tersebut PKn juga mempunyai fungsi lain yaitu:

a. Menanamkan Semangat Kebangsaan

Melalui PKn di perguruan tinggi dalam MPK PKn diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam menanamkan semangat kebangsaannya, rasa cinta nya kepada tanah air, demokrasi dan memiliki kesadarn hokum serta penghargaan dan partisipasinya dalam membangun bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (kemendikbud, 2012).

Salah satu alasan dipilihnya jalur pendidikan dalam mengembangkan system kewarganegaraan karena hal tersebut sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana kutipan dari pembukaan UUDNRI Tahun 1945”.... Mencerdaskan kehidupan bangsa...” sehingga hal yang ditempuh salah satunya adalah melalui pendidikan terutama PKn.



Membangun semangat kebangsaan

(sumber: google.com)

b. Menciptakan Warga Negara yang Sadar akan Hak dan Kewajibannya

Fungsi lain PKn adalah sebagai alat untuk mewujudkan negara yang warganya memiliki sikap yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Selain itu diharapkan mereka juga memiliki kecerdasan yang akan membangun negara dikemudian hari tanpa melupakan identitasnya sebagai warga negara Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan amanah kemendikbu tahun 2012 bahwa ... menyelenggarakan PKn untuk setiap mahasiswa guna terwujudnya warga negara yang baik dan sadar akan hak dan kewajibannya, cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk mengembangkan bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945.

c. Membangun Warga negara yang berkepribadian Pancasila

Fungsi lain yang tak kalah penting dalam PKn adalah membangun karakteristik mahasiswa selaku peserta didik yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual namun harus pula memiliki kepribadian yang nejunjung agama, kemanusiaan, keadaban, dan demokratis yang sesuai Pancasila. Hal ini sejalan dengan pendapat Hariyanto (2013: 7) '..... dengan PKn diharapkan intelektuan Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai WNI yang demokratis, religious, berkemnusiaan dan berkeadaban. Apabila hal ini dapat dijalankan maka Negara Indonesia akan menjadi lebih kuat dan tindakan yang ditimbulkan seperti korupsi dll dapat ditanggulangi.

d. Memahami Sistem Kenegaraan RI berdasarkan UUDNRI T 1945

Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada diIndonesia. Dengan demikian pemahaman terhadap sumber tersebut perlu ditekankan bahwa didalam Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 berikan sitem yang digunakan bangsa Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, hubungan warga negara dan negara. Dimana menurut widjaja (2002:89)'... hubungan negara dan wara negara serta penduduk berisi konsep bahwa IPOLEKSOSBUDHANKAM yaitu ideology,politik, social budaya dan pertahanan keamanan dll....'

Dengan demikian, hal ini menunjukkan hubungan negara dengan warganegara dapat dikatakan mencakup segala bidang. Tujuan penanaman system kenegaraan adalah agar kelak di masa depan tidak ada lagi yang mengganggu gugat Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945.

2. Tujuan PKn

Tujuan PKn secara umum terbagi menjadi dua yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

a. Tujuan PKn secara Umum

Tujuan PKn secara umum adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta keahlian dari diri mahasiswa tentang hubungannya sebagai warga negara dengan negaranta agar dapat menjadi manusia yang mampu diandalkan dan berguna bagi negaranya.

b. Tujuan PKn Secara Khusus

Tujuan PKn secara khusus adalah untuk menjadikan manusi/ mahasiswa atau pelajar mengerti dan menerapkan setiap hak dan kewajibannya dengan cara yang beretika secara baik, sopan, santun, demokratis dan jujur serta mempunyai sikap rela berkotban dalam upaya bela negara. Selain itu untuk menjadikan warga negara Indonesia yang terdidik, dan bertanggung jawab.

Pendapat Hariyanto (2013:8) menyebutkan bahwa tujuan PKn adalah membentuk karakter bangsa Indonesia. Membentuk sebagai upaya dalam menciptakan keterampilan partisipatif yang akan dimiliki oleh mahasiswa sebagai warga negara dan bisa bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu diharapkan juga dapat bersikap kritis, cerdas dan aktif dalam memperkuat integrasi bangsa.

E. Hakikat Pendidikan Karakter

Bangsa Indonesia saat ini adalah bangsa yang sedang berkembang menjadi bangsa yang besar dan berpotensi untuk maju. Kemampuan bangsa Indonesia tidak jauh dari bangsa-bangsa lain di dunia. Salah satu yang menjadi pondasi kuat bangsa Indonesia adalah nilai-nilai kearifan

bangsa Indonesia, yang pada saat ini menjadi sorotan penting dan kadang dianggap telah merosot dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa indikasi kemerosotan bangsa Indonesia ini akibat pengaruh liberalisasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Cholisin (2012) dan Budimansyah (2007) bahwa liberalisasi ini dipicu oleh bentuk perekonomian neoliberalisme dengan tiga tanda yaitu materialism, pragmatism dan individualisme. Dengan demikian menyebabkan politik atas dasar transaksi keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun kelompoknya.

Dampak lain yang ditimbulkan yaitu pada aspek social dimana nilai-nilai karakter bangsa berdasarkan Pancasila dengan pilar Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta Keadilan social terlihat menurun dengan lebih menonjolnya sikap individualis masyarakat. Salah satu contoh yaitu menyelesaikan masalah-masalah dengan kekerasan dan termasuk adanya perceraian sebagai bentuk lemahnya system kekeluargaan di masyarakat.

Situasi yang demikian sangat mengkhawatirkan pemerintah, dengan adanya masalah tersebut pemerintah berupaya menanggulangi melalui perencanaan revitalisasi pendidikan karakter melalui rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN) yang dirancang untuk tahun 2005-2025 bahwa pembangunan karakter menjadi prioritas pembangunan nasional, (Tim Pendidikan Karakter, 2010).

Selain itu hal ini juga disampaikan oleh Ramly (2011) bahwa pendidikan karakter menjadi pondasi dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebagai contoh menjadikan masyarakat berakhlak mulia, memiliki moral yang baik, beretika sesuai dengan Pancasila dan UUDNRI Tahun1945. Karakter penting bagi warga sekolah maupun perguruan tinggi adalah kemauan dan kesadaran untuk mewujudkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupannya sehari-hari termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia saat ini karena kebanyakan remaja/pemuda telah kehilangan jati diri atau identitas keIndonesiaannya. Terutama mereka sangat mudah terpengaruh oleh media massa. Sehubungan dengan hal tersebut sangat penting bagi pemerintah untuk menguatkan pendidikan karakter terutama di dalam lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi melalui PKn. Guru dan dosen harus mampu menyeimbangkan kemampuan peserta didik bukan hanya hebat dalam pengetahuan saja tetapi lebih utamanya

adalah pada ranah atau domain sikap atau perilaku. Dalam membentuk sikap, perilaku atau watak tersebut tentunya diperlukan kesinambungan dan harmonisasi antara keluarga, sekolah dan masyarakat, tanpa hal tersebut barang tentu semua itu tidak akan berhasil. Penanaman tersebut hendaknya dari kecil dalam keluarga sampai pada jenjang SD dan ke Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu kebijakan mata pelajaran PPKn atau PKn mulai dari tingkat dasar, menengah sampai pada perguruan tinggi karena pembelajaran PPKn/PKn adalah pembentukan karakter yang sosialis dan mengandung kesopanan.

Karakter adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir, dengan adanya pendidikan karakter tentunya akan mempermudah pembangunan bangsa. Karakter adalah kualitas moral yang tahan lama terdapat atau tidak terdapat pada individu melalui pola-pola perilaku tindakan yang dapat dievaluasi, (Kalidjernih, 2010). Kemudian menurut Suyanto (2009) seseorang dapat dikatakan memiliki perilaku baik apabila orang tersebut dapat mengambil keputusan dan siap mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.

Dengan demikian, ada istilah penting berkaitan dengan karakter seseorang yaitu kemampuan olah pikir, olah hati, olah raga dan kinestetik serta olah rasa/karsa. Kemampuan olah pikir berkaitan dengan proses bernalar dengan menggunakan pikiran dan pengetahuan secara kritis, kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pribadi yang cerdas. Kemampuan olah hati berkaitan dengan keyakinan serta sikap yang menghasilkan karakter jujur dan bertanggung jawab. Selain itu olahraga yaitu kemampuan sportivitas yang menghasilkan sikap bersih, menarik dan sehat serta kemudian olah rasa dan karsa yaitu kemampuan berkeaktifitas, kepedulian dan citra, (Kementrian Pendidikan Nasional;Budimansyah: 2010).

Sejalan dengan pengertian tersebut maka karakter memiliki fungsi sebagai kekuatan mental dan etik suatu bangsa guna mewujudkan cita-cita , keunggulan bangsanya dibandingkan dengan bangsa lain. Untuk mengembangkan karakter dapat dilihat melalui:

1. Karakter Individual

Karakter individual yaitu hasil keselarasan dalam diri individu melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga dimana akan muncul sikap tanggung jawab, jujur, kreatif, sehat, peduli dan cerdas.

2. Karakter Privat dan Karakter Publik

Karakter privat dan karakter publik meliputi tanggung jawab moral, disiplin diri serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari seorang individu, (karakter privat). Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, taat aturan, kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dengan orang lain serta mampu berpikir kritis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian karakter privat dan karakter publik antara lain:

- a. Menjadi anggota masyarakat yang independen
- b. Memenuhi tanggung jawab secara keseluruhan bagi anggota kewarganegaraan dalam bidang politik dan ekonomi
- c. Menghormati sesama manusia
- d. Berpartisipasi pada semua urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan aktif

F. Karakter Bangsa Indonesia Sesuai Dengan Pancasila

Bangsa Indonesia harus memiliki karakter yang kuat dan baik karna dengan adanya karakter tersebut akan menentukan perilaku umum (kolektif) bangsa Indonesia. Karakter tersebut sudah ada pada bangsa Indonesia dan tugas bangsa Indonesia saat ini adalah memperkuat karakter tersebut ditengah derasnya terpaan arus globalisasi dalam segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakter tersebut adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945. Secara komprehensif nilai-nilai tersebut adalah:

1. Nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Bangsa Indonesia yang berke-Tuhanan YME merupakan bentuk kesadaran bangsa Indonesia bahwa setiap tingkah laku yang mereka lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh yang maha kuasa. Sikap tersebut mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kepribadian, berakhlak mulia. Sikap ini dapat diwujudkan dengan mengedepankan rasa saling menghormati, toleransi dan mampu bekerjasama antar pemeluk agama satu dengan lainnya. Sikap yang menghargai kebebasan setiap orang untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebuah sikap atau perilaku yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati. Karakter yang dapat tercermin antara lain yaitu pengakuan terhadap persamaan harkat dan martabat manusia, hak dan kewajiban, saling mengasihi dan mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tidak berlaku semena-mena pada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memiliki sikap berani dalam membela keadilan dan kebenaran.

3. Persatuan Bangsa

Bangsa yang mengutamakan pentingnya persatuan bangsa Indonesia haruslah menjadi karakter setiap warga negara Indonesia. Karakter yang sesuai dengan nilai ini adalah karakter yang dimiliki seorang pribadi yang mementingkan urusan negara di atas kepentingan individu dirinya maupun kelompok. Karakter ini tercermin melalui sikap rela berkorban.

4. Musyawarah

Bangsa yang demokratis juga menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan dan Menegakkan HAM akan tercermin melalui sikap atau perilaku yang mampu mengedepankan kepentingan masyarakat juga negara, tidak kan memaksakan kehendak kepada orang lain, lebih mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Selain itu juga mampu mempertanggungjawabkan keputusannya di hadapan manusia dan Tuhan YME.

5. Keadilan Sosial

Bangsa yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan masyarakat atau keadilan social yaitu tercermin dalam perbuatan yang memperlihatkan semangat kegotong-royongan dan kekeluargaan, serta sikap adil dan menjaga keharmonisan antara haknya dan kewajibannya. Kemudian mampu menghormati orang lain baik yang lebih muda maupun yang lebih tua.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berperan penting dalam meletakkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dimensi Pancasila sebagai dimensi realitas, idealitas dan fleksibilitas.

Dimensi realitas menunjukkan bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai cermin objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dimensi idealitas menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil haruslah berpihak pada masyarakat bukan pada pengambil kebijakan dan dimensi fleksibilitas menunjukkan bahwa Pancasila tidaklah kalu dan beku namun sangat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

G. Pembentukan Karakter Melalui PKN

Berdasarkan sejarah keberadaan bangsa Indonesia sesungguhnya pembentukan karakter telah dimulai sejak saat itu. Hal ini dibuktikan dalam UUDNRI Tahun 1945 yang isinya syarat dengan karakter terutama di dalam pembukaan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun dalam perjalanannya memiliki berbagai hambatan secara politik, ekonomi, sosial budaya yang perlu untuk diselesaikan.

Salah satu sarana pemecahan masalah pembentukan dan penanaman karakter yang baik adalah melalui media pendidikan. Melalui pendidikan manusia dituntut untuk berpikir dari hal-hal yang tidak atau belum mereka ketahui menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa dari seseorang yang belum baik menjadi seseorang yang lebih baik. Melalui pendidikan diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi bangsa Indonesia yang semakin baik dan semakin maju.

Wadah yang dapat digunakan untuk membangun karakter bangsa Indonesia melalui pendidikan adalah dengan mata pelajaran PPKn untuk persekolahan dan PKN di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Dimana tujuan dari PKN adalah untuk mengubah suatu tatanan yang ada dalam masyarakat dimana masyarakat tersebut dituntun untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*). Apabila hal ini terwujud maka akan menciptakan sebuah kondisi masyarakat dan negara yang kondusif, aman dan tentram.

Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa hasil dari proses pendidikan menemukan bahwa beberapa diantara orang yang pandai dengan nilai akademik tinggi kurang arif bahkan sombong, orang yang berkuasa tetapi tidak amanah dan beberapa dari para tokoh masyarakat tidak menjadi teladan. Dengan demikian, penekanan dan penguatan pendidikan karakter menjadi tugas bersama bagi setiap orang dan menjadi tugas yang sangat krusial bagi

guru dan dosen PKn. Karena seperti yang kita ketahui bahwa fokus utama dari pembangunan bangsa adalah membangun masyarakatnya bukan pada pembangunan fisik semata. Oleh sebab itu, membangun jati diri, keutuhan dan martabat manusia adalah prioritas, (Puskurkemendiknas, 2010). Selain itu, pembangunan karakter merupakan pengembangan segala aspek potensi keunggulan bangsa dan juga meliputi segala dimensi, (Winataputra, 2012:34).

PKn sebagai bidang ilmu yang ditopang oleh berbagai bidang disiplin ilmu antara lain sosiologi, ilmu politik, psikologi dan lainnya dapat digunakan dalam melakukan kajian terhadap sebuah konsep, nilai serta perilaku demokratis warga negara dengan hasil kemampuan intelektual dan social. Hakikat dari tujuan PKn dalam membentuk karakter warga negara mencakup antarlain: 1. Peka terhadap adanya informasi baru yang akan dijadikan pengetahuan dalam kehidupannya, 2. Memiliki kemampuan dalam menyerap informasi yang baru, 3. Mampu memanfaatkan, menggunkan dan mengorganisasikan informasi baru, 4. Mampu membina hubungan interpersonal dan juga partisipasi social, dan 5. Menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai karakter bangsa dalam pergaulannya.

Beberapa nilai karakter yang dapat ditransformasikan melalui PKn antara lain yaitu, (Soemarsono: 2001):

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME
2. Jujur sebagai seorang warganegara yang baik
3. Adil
4. Memiliki rasa hormat
5. Memiliki sikap kritis
6. Terbuka
7. Rasional
8. Cerdas dan Arif

Program Strategis yang dapat dilakukan PKn dalam membentuk karakter adalah dengan bersinerginya antar komponen bangsa terutama guru atau dosen dalam mempersiapkan generasi masa depan yang berkarakter dengan cara:

- a. Membantu pertumbuhan jati diri bangsa baik secara individu maupun kultural secara bersama-sama dengan memahami kekuatan dan kelemahan yang dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan.

- b. Melibatkan peserta didik dalam observasi dan juga partisipasi baik itu di sekolah, kampus maupun di masyarakat.
- c. Menjernihkan isu-isu yang ada, baik isu local maupun global.
- d. Mengembangkan perspektif peserta didik berdasarkan dari pengalaman hidupnya.
- e. Mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis
- f. Mengembangkan jiwa kepemimpinan bagi warga negara untuk dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa

Soal Latihan

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Jelaskan latar belakang Pendidikan kewarganegaraan diperguruan tinggi!
2. Jelaskan hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pengembangan kepribadian mahasiswa!
3. Jelaskan fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari aspek pembentukan warga negara yang baik dan cerdas!
4. Uraikan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila!
5. Uraikan Peran PKn dalam membentuk Karakter Bangsa Indonesia!

Petunjuk jawaban

1. Ulas kembali substansi pendidikan kewarganegaraan dalam kaitannya dengan sejarah bangsa, demokratisasi, globalisasi, dan upaya bela negara secara non fisik
2. Pahami kembali materi mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari kelompok MPK sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
3. Baca kembali materi mengenai fungsi dan tujuan PKn sebagai instrument pendidikan karakter

Daftar Pustaka

- Budimansyah, D. 2007. Pendidikan Demokrasi Sebagai Konteks Civic Education di Negara Berkembang. *Acta Civicus* 1 (1), 11-26.
- _____. 2010. Penguatan Pendidikan Karakter untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
- Cholisin. 2011. Peran Guru dalam Pendidikan Karakter. Makalah disampaikan pada seminar. <http://aalsaprialman...> diakses agustus
- Darmodihardjo, Darji, dkk. 1991. *Santiaji Pancasila suatu tinjauan filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hariyanto, Erie. 2013. *PPKn*. Yogyakarta: CV Salsabila Putra Pratama.
- Kalidjernih., F.K. (2010). *Situsionisme: Refleksi untuk Pendidikan Karakter Indonesia*: Bandung: seminar UPI.
- Ramly, dkk. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter: Kementerian Pendidikan*
- Sumarsono. 2001. *PKn*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suyanto. 2010. Urgensi Pendidikan Karakter. Waskita madrik, wordpress.com diakses agustus
- Tim Pendidikan Karakter. 2010. *Pendidikan Karakter di SMP*. Kementerian Pendidikan
- Winarno. 2010. *Paradigma Baru PKn*. Jakarta: Bumi Aksara
- Zaelani, S dkk. 2002. *PKn*. Yogyakarta: Paradigma

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas

Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi